ANALISIS PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007-2011

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : FITRI NURHADI

NIM : 222007148

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2012

ANALISIS PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007-2011

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

NAMA : FITRI NURHADI

NIM : 222007148

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fitri Nurhadi
NIM	: 222007148
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Desember 2012

Fitri Nurhadi

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **ANALISIS PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007-2011**

Nama	:	**Fitri Nurhadi**
Nim	:	**22.2007.148**
Fakultas	:	**Ekonomi**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	:	**Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal, Desember 2012

Pembimbing

(Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si)
NIDN/NBM:0029097804

Mengetahui Dekan
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si.)
NIDN/NBM:0228115802

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.*
- *Segala yang indah belum tentu baik namun segala yang baik sudah tentu indah*

(Fitri Nurhadi)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- *Ayah (Marsidi) dan Bundaku (Maryam A.Ma.Pd) yang membesarkanku, mendidikku, serta yang selalu mendo'akan demi keberhasilanku.*
- *Saudara-saudaraku tersayang (Dede Saputro A.md dan Putri Nuraini)*
- *Someone (Lilis Suryani)*
- *Sahabatku Terkasih*
- *Almamater*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji syukur hamba ucapkan kepada Mu ya Robb, yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam penulisan skripsi ini, shalawat dan salam kepadaUswatun Hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Tauladan bagi seluruh umat dunia ini. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penulisan skripsi ini yang berjudul : Analisis Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011.

Dengan tekad dan semangat penulis menjalankan proses perkuliahan dengan ikhlas, walaupun adanya rintangan-rintangan yang dihadapi. Penulis menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan haruslah di dahului dengan rintangan, agar kesuksesan yang diraih kelak menjadi buah yang sangat manis. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini khususnya, dan selesainya masa studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang Umumnya. Maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua penulis. (Marsidi) dan (Maryam A.Ma.Pd), yang selalu mendukung serta

mendo'akan penulis dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak dan kalangan, mereka adalah :

1. Bapak H. M. Idris, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Taufiq Syamsuddin S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali S.E.,AK.,M.Si dan ibu Welly S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi S.E.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang telah member kemudahan dan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Fahmi S.E.,M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Staf Pengajar, Fakultas Ekonomi yang telah member ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga bermanfaat, amiin.
7. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih beserta Staf dan Pegawai yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data.
8. Adik-adikku yang aku sayang, Dede Saputro A. Md dan Putri Nuraini yang telah memotivasi dan mendo'akan penulis atas keberhasilan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku, Rian Kurniawan S.E, Dasriyandi S.E, dan Muhammad Reza S.E yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

10. *Someone* Ku, Lilis Suryani yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam penyelasaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul salam denagn segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasannya dari-Nya, Amiin.

Palembang, Desember 2012

FITRI NURHADI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN BEBAS PLAGIAT ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ..... **iv**

PRAKATA ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GRAFIK..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya..... 8

B. Landasan Teori..... 9

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..... 9

2. Peraturan Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..... 10

3. Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah... 14

4. Efektifitas dan Efisiensi..... 16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 19

B. Tempat Penelitian..... 20

C. Operasional Variabel..... 20

D. Data yang Diperlukan..... 20

E. Teknik Pengumpulan Data..... 21

F. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 24

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah..... 24

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah..... 24

3. Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 46

B. Pembahasan Hasil Penelitian 48

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.I Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih..... 5

Tabel III.I Operasionalisasi Variabel..... 20

Tabel IV.I Perubahan Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011..... 50

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik IV.1 Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011 57

Grafik IV.2 Anggaran Belanja Tidak Langsung Pegawai Kota Prabumulih Tahun 2007-2011 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Lulus Membaca dan Hafalan Al-Quran

Lampiran 2 Sertifikat Lulus TOEFL

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Biodata Penulis

ABSTRAK

Fitri Nurhadi NIM 22 2007 148 (2012), "Analisis Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011".

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 dan apakah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 sudah efektif dan efisien. Tujuannya untuk mengetahui perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun2007-2011 dan untuk menilai efektifias dan efisiensi alokasi pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena pembahasan yang akan dilakukan bersifat mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan masukan mengenai perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011.

Hasil analisis menunjukkan perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 ada yang belum efektif dan efisien yaitu pada tahun 2008, 2009, dan 2010 belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga mengalami devisid, sedangakan pada tahun 2007 dan 2011 mengalami *saving* atau kelebihan pendapatan.

Kata Kunci : Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRACT

Fitri Nurhadi NIM 22 2007 148 (2012), "Analysis of Changes in Revenues and Expenditures Budget Allocation Urban Prabumulih Year 2007-2011".

The formulation of the problem in this study are how to changes in the allocation of local budget of Prabumulih in 2007-2011 and whether budget allocations of local bugdet Prabumulih in 2007-2011 had been effective and efficient. The aim are to determine changes in the allocation of local budget in Prabumulih in 2007-2011 and to assess the effective and efficient allocation of local budget in Prabumulih in 2007-2011.

This study is included a descriptive type of research because the explanation will have done is to know the value of independent variable, either a variable or more without making a comparison or connection between one variable to another variable. The data is used in this study is the primary data and secondary data. Data collection techniques in the writing of this thesis is using interview and documentation. The method of analysis used is a method of quantitative analysis. The study is useful for the Office of Finance and Asset Management Revenue Region as inputs on the change budget allocations of local budget Prabumulih in 2007-2011.

Analysis result revealed thet changing in the allocation of local in 2007-2011 Prabumulih city there is not effective and efficient yet that by 2008, 2009, and 2010 expenditures greater than that experience devisid revenues, while the 2007 and 2011 have saving or excess income.

Keywords: Change Allocation of Revenue and Expenditure Budge

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah juga didukung oleh sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah dan hasil perusahaan milik daerah. Hal pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam hal pembayaan yang berasal dari pendapatan daerah harus diperhatikan, sehingga pendapatan asli daerah semakin terasa kontribusinya yang cukup penting dari pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Selain pembangunan nasional yang diutamakan, pembangunan daerah juga perlu di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan konsisten guna tercapai peningkatan pendapatan daerah. Mengingat pendapatan daerah sumber utama pembiayaan pembangunan daerah perlu diperhatikan dalam pencapaian penerimaannya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang direvisi nomor 32 tahun 2004 yang berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering

disebut undang-undang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. Adapun dibentuknya daerah otonomi yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan agar dapat berfungsi secara efektif dan tercapainya tujuan pembentukan daerah otonomi, maka kepala daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya, salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, meliputi: pemungutan sumber-sumber pendapatan, penyelenggaraan, pengurus, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah, penetapan APBD dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD,

sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Abdu Halim, 2002). Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu mesin pendorong ekonomi dan belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, balanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan.

Dana bagi hasil, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana alokasi khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan, lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisisen oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Berdasarkan survei pertemuan pada staf divisi umum di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih dapat dilihat pada table 1 berikut ini:

Tabel 1

Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Prabumulih Tahun 2007-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
1	**Pendapatan Daerah**					
	PAD	Rp. 15.876,98	Rp. 16.457,79	Rp. 21.713,63	Rp. 25.215,40	Rp. 32.107,80
	Dana Perimbangan	Rp. 307.157,45	Rp. 362.860,67	Rp. 347.911,20	Rp. 387.376,41	Rp. 464.066,30
	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 964,61	Rp. 18.596,35	Rp. 25.049,34	Rp. 78.777,08	Rp. 78.894,28
	Total Pendapatan Daerah	Rp. 350.737,78	Rp. 397.914,81	Rp. 394.677,19	Rp. 491.368,90	Rp. 576.068,39
2	**Belanja Daerah**					
	Belanja Tak Langsung	Rp. 165.560,20	Rp. 232.322,68	Rp. 157.290,72	Rp. 197.826,47	Rp. 229.580,01
	Belanja Langsung					
	– Belanja Pegawai	Rp. 456,96	Rp. 770,08	Rp. 26.482,72	Rp. 22.797,41	Rp. 18.147,65
	– Belanja Barang dan Jasa	Rp. 89.635,65	Rp. 151.646,40	Rp. 90.562,06	Rp. 88.975,33	Rp. 128.292,91
	– Belanja Modal	Rp. 70.156,66	Rp. 69.790,04	Rp. 205.962,73	Rp. 185.899,48	Rp. 128.006,45
	Total Belanja Daerah	Rp. 325.809,49	Rp. 456.262,92	Rp. 480.298,24	Rp. 495.498,70	Rp. 504.087,04

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2007-2011

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan balanja daerah pada tahun 2008, 2009, dan 2010 mengalami devisid, dimana pendapatan daerah lebih kecil dari pada belanja daerah, sedangkan pada tahun 2007 dan 2011 mengalami *saving*, dimana pendapatan daerah lebih besar dari pada belanja daerah.

Dengan uraian diatas bahwa fenomena yang terjadi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu belum efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mmilih judul " **Analisis Perubahan Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011.**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

a. Bagaimanakah perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011?
b. Apakah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 sudah efektif dan efisien?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

a. Untuk mengetahui perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011.

b. Untuk menilai efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mengetahui efektif dan efisien perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011.

b. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bahan masukan mengenai perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul " Analisis Pembagian Alokasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan " (Dasriyandi, 2011). Perumusan masalah adalah bagaimanakah pembagian alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan upaya kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembagian alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan upaya kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan pengukuran mengenai pembagian alokasi anggaran belanja langsung yang berhubungan dengan upaya kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, pembagian alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan upaya kesehatan mengalami peningkatan, tetapi untuk anggaran promotif dan preventif mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pemerintah yang beranggapan bahwa target sasaran sudah tecapai. Padahal pembagian anggaran promotif dan preventif untuk program dan kegiatan masih banyak yang belum tercapai. Belum tercapainya anggaran promotif dan preventif disebabkan masih anyak penduduk yang belum terlindungi kesehatannya.

Penduduk yang tidak terlindungi kesehatannya ini adalah mereka yang benar-benar tidak terjangkau oleh sistem pembayaran pra upaya, sehingga mereka harus membayar langsung apabila memerlukan pelayanan kesehatan. Keadaan ini akan mempengaruhi tujuan pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu : (1) Meningkatkan umur harapan hidup dari 69,9 tahun menjadi 71,5 tahun; (2) Menurunnya angka kematian bayi dari 25,8 menjadi 23,5 per 1000 kelahiran hidup; (3) Menurunnya Prevelensi gizi kurang pada anak balita dari 1,1% menjadi 0,9%; dan (4) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 197,4 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 119,8 per 100.000 kelahiran hidup.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa kedua penelitian ini sama-sama menganalisis masalah alokasi anggaran. Sedangkan perbedaaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisis alokasi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis alokasi anggaran belanja langsung.

B. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu anggaran daerah, dimana anggaran merupakan proses sistem pengendalian. Anggaran merupakan salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat

disebut anggaran. Menurut Mardiasmo (2002:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dnyatakan dalam bentuk ukuran financial.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai anggaran yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Peraturan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuaan untuk mengurangi kesenjangan fisikal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggara pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 dana bagi hasil bersumber dari :

1. Pajak

   - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

     Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian yaitu, 16,2% untuk daerah provinsi, 64.8% untuk daerah kabupaten/kota dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan yaitu, 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota, dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sector tertentu.

   - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB)

     Dana bagi hasil dari penerimaan BPHATB sebesar 80% dengan rincian yaitu, 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi, dan 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten dan kota. Sedangkan 20% bagian

pemerintah dari penerimaan BPHATB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

  Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah yaitu, sebesar 20% yang dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Dimana 60% untuk kabupaten dan kota dan 40% untuk provinsi.

2. Sumber Daya Alam

   - Kehutanan

     Penerimaan dari sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) dan provisi sumber daya hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan yaitu, 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

   - Pertambangan Umum

     Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

dibagi dengan imbangan yaitu, 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

- Perikanan

  Dana bagi hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan yaitu, 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten dan kota.

- Pertambangan Minyak Bumi

  Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untu daerah.

- Pertambangan Gas Bumi

  Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

- Pertambangan Panas Bumi

  Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan

Negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

3. Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Adapun unsure-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
2. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
3. Hasil retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten yang terdiri dari atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah kota dan pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah terbagi menjadi 2, yaitu belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung dibagi menjadi 3 menurut jenis belanja yaitu : belanja pegawai, bunga, dan subsidi. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :

a) Belanja Pegawai

   Belanja pegawai sebagaimana mestinya untuk pengeluaran honorarium atau upah daiam melaksanakan program dan kegiatan pemerinah daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk melaksanakan pogram dan kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja Modal

   Belanja modal sebagaimana mestinya digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. dan atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

4. Efektifitas dan Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2002:133-134) mengatakan bahwa untuk mengukur perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu ada 2 sebagai berikut :

1. Pengukuran Efisiensi

   Merupakan pengukuran dengan rasio antara output dengan input untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

2. Pengukuran Efektifitas

   Merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujunnya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berkerja dengan efektif.

Menurut Mahsun (2006:181), mengatakan bahwa untuk mengukur mengukur perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu ada 2 sebagai berikut :

1. Pengukuran Efisiensi

   Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi

anggaran pendapatan dan belanja daerah guna untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*speding well*). Jika pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomis kerena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan belanja.

Pengukuran efisiensi memerlukan data-data realisasi belanja untuk memperoleh pengukuran efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \text{ X } 100\%$$

Kriteria efisiensi adalah :

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti efisien.

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti efisien berimbang.

c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%) berarti tidak efisien.

2. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai sasaran atau tujuan akhir kebijakan.

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.

Berikut formula untuk mrngukur tingkat efektifitas.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \text{ X } 100\%$$

Kriteria efektifitas adalah :

a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti tidak efektif.

b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti efektifitas berimbang.

c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X >) berarti efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:10-11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 macam yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

   Penelitia deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indefenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

2) Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabel masih sama dengan penelitan variabel mandiri tetapi sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3) Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena pembahasan yang akan dilakukan bersifat mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan kota Prabumulih yang beralamat Jalan Raya Prabumulih-Palembang Km. 12 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Perubahan Alokasi APBD	Perubahan alokasi anggaran mengenai estimasi kinerja pemerintahan daerah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial	- Alokasi Pendapatan - Alokasi Belanja - Efektifitas dan Efisiensi

Sumber : Penulis 2012

D. Data yang diperlukan

Menurut Nur Indiartoro dan Bambang Supono (2004:146) dilihat dari cara memperoleh data terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh melalui dan dicatat orang lain)

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan staf divisi umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Prabumulih. Data sekunder yaitu terdiri dari dokumen realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin W. Gulo (2000:116) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Pengamatan (Observasi)

   Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

   Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon tentang sampel.

3. Wawancara

   Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuesioner

   Kuesioner adalah pernyataan yang disusun dalam bentuk kalimat Tanya.

5. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah survey yaitu meminta tanggapan kepada staf divisi umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Prabumulih secara langsung tentang sampel yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan dokumentasi yaitu dengan meminta data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sama dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal Hasan (2003:32) analisis data terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

   Analisis Kualitatif adalah yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

   Analisis kuantitatif adalah analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan

angka, table, dan uraian penjelasan mengenai perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2007-2011 kota Prabumulih, dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah, pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih sesuai dengan kewenangan. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Raya Prabumulih-Palembang Km. 12 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Wilayah kerja dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi kecamatan Prabumulih Barat, kecamatan Prabumulih Timur, kecamatan Prabumulih Utara, kecamatan Prabumulih Selatan, kecamatan Cambai, dan kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT).

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih

a) Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui

terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih.

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan wujud pelaksanaan kota Prabumulih dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dimana dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih dipimpin oleh seoarang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekontralisasi dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Membantu dalam menentukan kebijaksanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pengeluaran dan penerimaan kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya atas pelaksanaannya.
2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan.
3) Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendaptan daerah.

4) Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah.

5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh walikota kota Prabumulih

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dinas pendapatan penelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh walikota selaku kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Melakuakan pendaftaran dan pendapatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

c) Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan direktorat jendral pajak atau direktorat pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam menyajikan dan menerima kembali surat pemberitahuan objek dari wajib pajak.

d) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

e) Membantu penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak dan

sarana administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada pengawasannya.

f) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

g) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

h) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidang penetapan pendapatan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

i) Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

j) Melakukan urusan rumah tangga.

k) Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

l) Mengelola administrasi keuangan daerah dinas dan daerah kota.

m) Menguji kebenaran penagihan SPD dan Pembinaan bendahara.

n) Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dinas daerah.

o) Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah.

p) Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.

q) Mensosialisasikan semua undang-undang, peraturan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah.

r) Mengurus semua aset daerah dan memproses pemakaian dan pemanfaatan.

b) Susunan Organisasi

Susunan organisasi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih ditetapkan dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dan peraturan daerah kota Prabumulih penyebaran tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dimana susunan organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing unit dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih.

Adapun susunan organisasi dinas pendapayan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih terdiri atas :

1) Kepala dinas
2) Sekretariat, membawahi :
    a) Sub bagian umum kepegawaian
    b) Sub bagian keuanagan
    c) Sub bagian perlengkapan
3) Bidang pendapatan asli daerah, membawahi :
    a) Seksi pendaftaran dan pendataan
    b) Seksi penetapan
    c) Seksi penagihan
4) Bidang dana perimbangan dan penerimaan lainnya, membawahi :
    a) Seksi bagi hasil pajak
    b) Seksi bagi hasil bukan pajak
    c) Seksi penerimaan lain-lain
5) Bidang anggaran, membawahi :
    a) Seksi pembukuan, penerimaan kas daerah
    b) Seksi pengeluaran kas daerah
    c) Seksi pelaporan
6) Bidang akuntansi dan pelaporan, membawahi :
    a) Seksi pembukuan penerimaan dan pengeluaran
    b) Seksi pengelolaan investasi daerah
    c) Seksi akuntansi bidang milik daerah

7) Bidang aset daerah, membawahi :

   a) Seksi analisa kebutuhan

   b) Seksi inventarisasi

   c) Seksi pemeliharaan dan penghapusan

8) Bidang perbendaharaan, membawahi :

   a) Seksi penataan usaha dan penerimaan kas daerah

   b) Seksi pengeluaran kas daerah

   c) Seksi pelaporan

9) Unit pelaksana teknis dinas (UPTN)

c) Tugas dan Fungsi

Adapun uraian pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

   Kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

   Kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d) Pengelolaan kesekretariatan, meliputi perencanaan umum dan keuangan.

e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

f) Pelaksanaan dan pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, program, kepegawaian, dan perlengkapan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

b) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan serta hubungan masyarakat.

c) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja dilingkungan.

Bagian sekretariat terdiri dari :

a) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(2) Melaksanakan tugas keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dan dokumentasian kegiatan dinas.

(3) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan dinas.

(4) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.

b) Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan.

(2) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan.

(3) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan secara berkala dan menyusun laoporan keuangan akhir tahun.

c) Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan.

(2) Melaksanakan urusan rumah tangga ketertiban, keamanan, dan kebersiahan di lingkungan kerja.

(3) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor.

(4) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana di lingkungan.

3) Bidang pendapatan asli daerah

Tugas :

a) Melakukan pendaftaran atau pendataan, penetapan, dan penagihan yang berhubungan dengan pajak serta penerimaan dana bagi hasil pajak baik dari pemerintah pusat dan provinsi.

b) Membuat perkiraan atau asumsi rencana penerimaan pendapatan daerah dan mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah.

c) Menyusun rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi.

d) Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah.

e) Melakukan penyuluhan pajak daerah dan pajak-pajak lainnya.

Fungsi :

a) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
b) Menyelenggarakan tugas penagihan pajak daerah serta penerimaan lain sesuai dengan kewenangan.
c) Menyelenggarakan tugas penyuluhan pengendalian dan pembinaan terhadap penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya.
d) Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan data dan informasi pajak dan pendapatan lainnya.
e) Penerbitan surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian pendapatan asli daerah, terdiri dari :

a) Seksi pendaftaran dan pendataanmempunyai tugas :
   (1) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan subjek atau objek pajak retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya.
   (2) Memberikan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan nomor pokok wajib pajak retribusi daerah (NPWPRD).

(3) Menghimpun dan memelihara data wajib pajak dan wajib retribusi.

(4) Melakukan verifikasi lapangan terhadap data subjek dan objek wajib pajak dan wajib retribusi.

(5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b) Seksi penetapan, mempunyai tugas :

(1) Menghitung dan menetapkan besarnyapajak dan retribusi.

(2) Menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi.

(3) Menerbitkan dan mendistribusikan serta mengarsipkan surat ketetapan pajak dan retribusi.

(4) Menberikan nomor pajak dan retribusi.

(5) Menerima dan memproses usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi.

(6) Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelasaian permohonan banding ke majelis pertimbangan.

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan tugasnya.

c) Seksi penagihan, mempunyai tugas :

(1) Menyiapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penagihan pajak dan retribusi.

(2) Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi.

(3) Melaporkan hasil penagihan pajak dan retribusi.

(4) Menyiapkan surat teguran dan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain

Tugas :

Bidang perimbangan dan penerimaan lain-lain mempunyai tugas merencanakan dan mengupayakan pengikatan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

Fungsi :

a) Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

b) Penghimpun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

c) Pelaksana kegiatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

d) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.

e) Pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada wajib pajak.

Bidang perimbagan terdiri dari :

a) Seksi bagi hasil pajak, mempunyai tugas :

(1) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil pajak.

(2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB.

(3) Melaksanakan kegiatan penggalian potensi terhadap pendapatan yang bersumber dari penerimaan bagi hasil pajak.

(4) Membantu direktorat jendaral pajak dalam rangak pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)-pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada para wajib pajak.

(5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b) Seksi bagi hasil bukan pajak, mempunyai tugas :

(1) Menghimpunb data, pedoman, dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil bukan pajak.

(2) Menghimpun data, pedoman, dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan bagi hasil bukan pajak.

(3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkai dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dan alokasi khusus (DAK) serta menyiapkan surat permintaan pencairan dana yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

(4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.

5) Bidang anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas, yaitu melaksanakan penyusunan dan pengelolaan dibidang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bidang anggaran juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Menyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b) Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

d) Penyiapan bahan pembinaan di bidang pendapatan dan belanja daerah.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan dan belanja.

6) Bidang akuntansi dan pelaporan

Bidang akuntansi, investasi, dan aset daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Mengkoordinasi, mengarahkan, dan pembina penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan dan pelaporan target atau ketetapan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

b) Melaksanakan pencatatan atau pembukuan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan.

c) Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan membina penyelenggaraan pencatatan atau pengelolaan data barang-

barang milik daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun barang milik daerah.

d) Penelitian dan pengevaluasian realisasi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

e) Penyiapan bahan rangka menyusun pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

f) Penyiapan bahan dalam rangka rapat evaluasi penerimaan pertanggung jawaban daerah.

Fungsi bidang akuntansi, investasi dan aset daerah sebagai berikut :

a) Melaksanakan pencatatan semua transaksi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

b) Melaksanakan pencatatan barang milik daerah melalui proses sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

7) Bidang aset daerah

Bidang aset daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pemeliharaan, pendistribusian, dan penghapusan aset daerah.

Bidang aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah.

b) Pengkoordinasian, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan inventarisasi atau pengelolaan data aset

daerah (barang milik daerah) sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah.

c) Pelaksanaan pencatatan aset daerah melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta membuat neraca daerah sebagai dari laporan keuangan daerah.

d) Penghimpun, pengidentifikasian data nominal barang-barang milik daerah atau kekayaan milik daerah sebagai bahan imformasi pencatatan aset daerah sesuai dengan standar akuntansi daerah.

e) Pencatatan dan pembukuan semua tindakan penyusunan administrasi yang menakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan atau barang milik daerah setiap tahun anggaran berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

f) Penyipanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

g) Penyusunan kebijakan standar pengelolaan aset daerah dan pedoman penghapusan barang milik daerah.

h) Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

i) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang aset daerah, terdiri dari :

a) Seksi analisa kebutuhan, mempunyai tugas :

(1) Membuat daftar rencana dan menganalisa rencana kebutuhan aset daerah.

(2) Menetapkan pedoman, sasaran, dan dasar hokum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang.

(3) Melakukan administrasi perencanaan dan penentuan kebutuhan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Mengkoordinasikan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

(5) Mengumpulkan dan menghimpun data informasi serta mengikuti perkembangan harga dalam rangka menyusun harga pokok setempat.

(6) Membuat pedoman dan informasi tentang harga pokok setempat.

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

b) Seksi inventarisasi, mempunyai tugas :

(1) Melakukan inventarisasi aset daerah.

(2) Menyusun daftar inventarisasi aset daerah dan menyusun data dasar aset daerah.

(3) Melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencatatan data, dan pelaporan barang inventarisasi aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap barang inventarisasi atau aset daerah dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Mengkoordinir laporan aset daerah dari SKPD.

(6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

c) Seksi pemeliharaan dan penghapusan, mempunyai tugas:

(1) Menyimpan, memelihara, dan melengkapi seluruh dokumen atau buku sah kepemilikan aset daerah.

(2) Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengendalian pemanfaatan aset daerah agar berdaya guna.

(3) Melaksanakan perubahan status hukum barang inventarisasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menyusun dokumen, prosedur, dan melaksanakan penghapusan aset daerah.

(5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

8) Bidang perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas, yaitu :

a) Mengkoordinasi, mengarahkan, dan membina penyelenggaraan piñata usahaan.

b) Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD), menyiapkan surat pemerintah pencairan dana (SP2D).

c) Memerikasa dan meneliti berkas surat pemerintah membayar (SPM) beserta kelengkapan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pembina piñata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

d) Pengkoordinasian dan pembina teknis penyelenggaraan piñata usahaan keuangan daerah dibdang bendahara.

e) Pelaksanaan penerimaan, menyimpan, dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah.

f) Penyiapan anggaran kas, penyusunan laporan arus kas serta pengendalian pengeluaran kas daerah.

g) Pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan piñata usahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pembiayaan daerah.

h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) secara periodik.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi, yaitu :

a) Mengkoordinasikan serta membina ketatausahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pembiayaan daerah.
b) Menguji kebenaran penagihan surat pemerintah membayar (SPM) dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menyiapkan surat penyediaan dana (SPD), dan surat pemerintah pencairan dana (SP2D) serta menyiapkan anggaran kas.
c) Menunjukkan bank operasional untuk melakukan penerimaan dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah.
d) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaram pendapatan dan belanja daerah (APBD) oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
e) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
f) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolah atau menatausahakan investasi daerah.
g) Melakuakn pembayaran berdasarkan pemintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

h) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

i) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah.

9) Unit pelaksanaan teknis dinas

Unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai tugas, yaitu :

a) Menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang baru, baik pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak daerah.

b) Sebagai koordinator penyampaian pajak bumi dan bangunan (PBB).

c) Sebagai koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tata kerja yang terdapat didalam organisasi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih sebagai berikut :

a. Kepala dinas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpin.

b. Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksanaan teknis dilingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

c. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bila terjadi penyimpanagn dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya.

d. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan secara berjenjang.

e. Setiap laporan diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

f. Melaksanakan evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah.

g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang.

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

i. Menyajikan informasi keuangan daerah.

j. Menyajikan data-data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca.

B. Pembahasan

Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 dan untuk menilai efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011.

1. Analisis Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu anggaran daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Dalam melaksanakan setiap kegiatannya pemerintah daerah harus mempunyai penganggaran atas kegiatan yang akan dilakukan.

Sebelumnya telah disajikan data meliputi gambaran umum, struktur organisasi, dan pembagian tugas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pembahasan pada Bab IV ini menyangkut masalah perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 serta membahas alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah apakah sudah efiktif dan efisien.

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan wujud pelaksanaan kota Prabumulih dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dimana dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Prabumulih dipimpin oleh seoarang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekontralisasi dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan.

Fungsi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mengurus semua aset daerah dan memproses pemakaian dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah diambil berdasarkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011

Uraian	2007			2008		
	APBD	Perubahan APBD	Realisasi	APBD	Perubahan APBD	Realisasi
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rp. 12.494.880.000	Rp. 15.876.986979		Rp. 15.330.580.000	Rp. 16.457.792.428
Pendapatan pajak daerah		Rp. 2.944.580.000	Rp .3.376.075.393		Rp. 3.134.080.000	Rp. 5.210.793.591
Hasil Retribusi Daerah		Rp. 3.313.100.000	Rp. 2.623.450.403		Rp. 3.209.500.000	Rp. 3.182.583.024
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp. 200.000.000	Rp. 346.747.973		Rp. 200.000.000	Rp. 528.193.190
Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp. 6.037.200.000	Rp. 9.530.713.210		Rp. 8.787.000.000	Rp. 7.536.222.622
DANA PERIMBANGAN		Rp. 286.183.761.242	Rp.307.157.452.404		Rp.351.521.316.472	Rp.362.860.671.755
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		Rp. 104.476.761.242	Rp.132.388.852.404		Rp.139.881.443.872	Rp.152.311.244.755
Dana Alokasi Umum		Rp. 161.515.000.000	Rp.161.515.000.000		Rp.182.026.272.600	Rp.180.935 827.000
Dana Alokasi Khusus		Rp. 20.192.000.000	Rp. 13.253.600.000		Rp. 29.613.600.000	Rp.. 29.613.600.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Rp. 0	Rp. 964.615.600		Rp. 17.927.291.313	Rp. 18.596.354.399
Pendapatan Hibah		Rp. 0	Rp. 0		Rp. 0	Rp. 0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		Rp. 0	Rp. 0		Rp. 17.927.291.313	Rp. 17.484.718.904
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		Rp. 0	Rp. 0		Rp. 0	Rp. 0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		Rp. 0	Rp. 0		Rp. 0	Rp. 0
Dana Darurat		Rp. 0	Rp. 0		Rp. 0	Rp. 0
Penerimaan Lain-Lain		Rp. 0	Rp. 964.615.600		Rp. 0	Rp. 1.111.635.495
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 314.466.843.142	Rp.350.737.785.305		Rp.384.779.187.785	Rp.397.914.818.582
BELANJA						
BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rp. 212.898.687.251	Rp.165.560.207.225		Rp.280.326.333.473	Rp.232.322.684.103
Belanja Pegawai		Rp. 115.817.937.819	Rp. 97.686.701.424		Rp.158.357.977.511	Rp.136.234.980.192
Belanja Hibah		Rp. 0	Rp. .0		Rp. 9.362.250.000	Rp. 7.705.538.401
Belanja Bantuan Sosial		Rp. 15.280.041.838	Rp. 13.102.949.043		Rp. 23.266.920.950	Rp. 20.637.201.200
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		Rp. 1.730.500.000	Rp. 195.286.400		Rp. 2.620.000.000	Rp. 1.685.000.000
Belanja Tidak Terduga		Rp. 1.500.000.000	Rp .0		Rp. 500.000.000	Rp. 0
Belanja Barang		Rp. 80.070.207.594	Rp. 54.575.270.358		Rp. 86.719.185.012	Rp. 66.059.964.310
BELANJA LANGSUNG		Rp. 238.471.483.373	Rp.160.249.289.688		Rp.268.140.660.186	Rp.222.206.542.085
Belanja Pegawai		Rp. 627.440.000	Rp. 456.967.000		Rp. 811.426.800	Rp. 770.082.200
Belanja Barang dan Jasa		Rp. 136.579.759.133	Rp. 89.635.654.710		Rp.181.917.438.167	Rp.151.646.410.229
Belanja Modal		Rp. 101.264.284.240	Rp 70.156.667.978		Rp. 85.411.795.219	Rp. 69.790.049.656
JUMLAH BELANJA		Rp. 452.870.170.624	Rp.325.809.496.913		Rp.550.966.993.659	Rp.456.262.926.188

Uraian	2009			2010		
	APBD	Perubahan APBD	Realisasi	APBD	Perubahan APBD	Realisasi
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 16.825.580.000	Rp. 19.198.580.000	Rp. 21.713.639.281	Rp. 21.145.580.000	Rp.26.973.357.885	Rp.25,215.405.648
Pendapatan pajak daerah	Rp. 3.929.080.000	Rp. 5.326.080.000	Rp. 5.201.416.209	Rp. 5.176.080.000	Rp. 5.426.080.000	Rp.6.171.585.652
Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.544.500.000	Rp. 3.315.500.000	Rp. 4.054.675.956	Rp. 3.495.500.000	Rp. 4.047.500.000	Rp.2.305.102.200
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 718.981.815	Rp. 250.000.000	Rp. 700.000.000	Rp. 749.110.009
Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 9.102.000.000	Rp. 10.307.000.000	Rp. 11.738.565.301	Rp. 12.224.000.000	Rp.16.799.777.885	Rp. 15.989.607.696
DANA PERIMBANGAN	Rp.373.650.744.981	Rp.376.888.135.548	Rp.347.911.209.665	Rp.388.750.635.661	Rp.384.203.363.610	Rp.387.376.410.588
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.148.113.392.381	Rp.155.743.200.548	Rp.126.783.874.665	Rp.157.193.683.061	Rp.176.999.743.610	Rp.180.172.790.588
Dana Alokasi Umum	Rp.191.965.352.600	Rp.187.553.335.000	Rp.187.553.335.000	Rp.197.965.352.600	Rp.188.426.720.000	Rp.188.426.720.000
Dana Alokasi Khusus	Rp. 33.572.000.000	Rp. 33.591.600.000	Rp. 33.577.000.000	Rp.33.591.600.000	Rp. 18.776.900.000	Rp. 18.776.900.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 22.775.040.000	Rp. 30.045.064.627	Rp. 25.049.345.309	Rp.26.382.564.514	Rp. 90.742.994.367	Rp. 78.777.084.228
Pendapatan Hibah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 22.775.040.000	Rp. 30.045.064.627	Rp. 19.956.890.712	Rp.26.382.564.514	Rp. 30.570.759.035	Rp. 23.900.492.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp .0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.382.066.000
Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp.45.217.959.132	Rp. 39.782.959.132
Dana Tunjangan Profesi Guru	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp .0	Rp.12.454.276.200	Rp. 12.418.201.200
Dana Darurat	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp.0	Rp. 0
Penerimaan Lain-Lain	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.092.454.597	Rp. 0	Rp.0	Rp. 293.365.896
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.413.251.365.281	Rp.426.131.780.175	Rp.394.677.194.255	Rp.436.278.780.175	Rp.501.919.715.862	Rp.491.368.900.465
BELANJA						
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.172.015.512.581	Rp.169.502.087.585	Rp.157.290.720.755	Rp.171.119.335.594	Rp.200.532.897.499	Rp.197.826.470.998
Belanja Pegawai	Rp.157.115.512.581	Rp.151.702.087.585	Rp.142.517.829.650	Rp.157.963.020.344	Rp.186.559.897.499	Rp.184.255.477.761
Belanja Hibah	Rp. 6.830.000.000	Rp. 7.305.000.000	Rp.6.747.104.500	Rp. 5.693.315.250	Rp. 5.610.000.000	Rp. 5.378.280.830
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.570.000.000	Rp. 9.995.000.000	Rp.8.025.786.605	Rp. 6.963.000.000	Rp. 8.363.000.000	Rp. 8.192.712.407
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 0	Rp. 0	Rp.0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Belanja Tidak Terduga	Rp .500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp.0	Rp. 500.000.000	Rp. 0	Rp. 0
BELANJA LANGSUNG	Rp.328.235.852.700	Rp.362.968.534.943	Rp.323.007.526.119	Rp.288.959.444.581	Rp.323.541.608.097	Rp.297.672.233.882
Belanja Pegawai	Rp. 30.244.587.140	Rp. 30.572.161.840	Rp. 26.482.724.265	Rp. 21.617.631.963	Rp. 24.956.156.503	Rp.22.797.410.858
Belanja Barang dan Jasa	Rp.99.169.865.757	Rp.106.257.743.521	Rp. 90.562.069.485	Rp. 97.136.207.403	Rp. 97.207.820.210	Rp.88.975.339.898
Belanja Modal	Rp.198.821.399.803	Rp.226.138.629.582	Rp.205.962.732.369	Rp.170.205.605.225	Rp.201.477.631.384	Rp.185.899.483.126
JUMLAH BELANJA	Rp.500.251.365.281	Rp.532.470.622.528	Rp.480.298.246.874	Rp.460.078.780.175	Rp.524.074.505.596	Rp.495.498.704.880

Uraian	2011		
	APBD	Perubahan APBD	Realisasi
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 26.877.233.067	Rp. 25.355.428.131	Rp. 32.107.805.653
Pendapatan pajak daerah	Rp. 8.072.300.000	Rp. 7.637.500.000	Rp. 9.798.712.170
Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.849.000.000	Rp. 2.884.000.000	Rp. 2.201.003.313
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	Rp. 940.224.286
Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 16.255.933.067	Rp. 14.133.928.131	Rp. 19.167.865.884
DANA PERIMBANGAN	Rp.483.288.017.405	Rp.440.740.145.312	Rp. 464.066.305.389
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.165.759.972.405	Rp.170.493.668.312	Rp. 193.942.719.389
Dana Alokasi Umum	Rp.299.641.875.000	Rp.247.679.377.000	Rp. 47.557.086.000
Dana Alokasi Khusus	Rp. 20.886.170.000	Rp. 22.567.100.000	Rp. 22.566.500.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 41.347.374.480	Rp. 70.624.789.851	Rp. 78.894.281.653
Pendapatan Hibah	Rp. 21.769.449.000	Rp. 0	Rp. 13.996.035.000
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 19.577.925.480	Rp. 26.999.012.357	Rp. 21.513.283.907
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 0	Rp. 13.017.675.000	Rp. 13.304.250.000
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 0	Rp. 6.813.642.014	Rp. 6.286.252.266
Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan	Rp. 0	Rp. 4.216.535.000	Rp. 4.216.535.000
Dana Tunjangan Profesi Guru	Rp. 0	Rp. 19.577.925.480	Rp. 19.577.925.480
Dana Darurat	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Penerimaan Lain-Lain	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.551.512.624.952	Rp.536.720.363.294	Rp. 575.068.392.695
BELANJA			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.274.963.492.884	Rp.238.369.345.218	Rp. 229.580.017.088
Belanja Pegawai	Rp.257.500.730.853	Rp.214.918.789.218	Rp. 207.308.906.686
Belanja Hibah	Rp. 10.566.966.850	Rp. 10.278.570.000	Rp. 9.968.450.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0	Rp. 12.359.486.000	Rp. 11.951.160.402
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. - 5.210.960.000	Rp. 312.500.000	Rp. 312.500.000
Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.684.835.181	Rp. 500.000.000	Rp. 39.000.000
BELANJA LANGSUNG	Rp.294.049.132.068	Rp.283.172.458.226	Rp. 274.507.023.356
Belanja Pegawai	Rp.14.737.380.500	Rp. 19.928.205.400	Rp. 18.147.657.750
Belanja Barang dan Jasa	Rp.133.594.681.051	Rp.143.125.610.659	Rp. 128.292.910.555
Belanja Modal	Rp.145.717.070.517	Rp.120.118.642.167	Rp. 128.066.455.051
JUMLAH BELANJA	Rp.569.012.624.952	Rp.521.541.803.444	Rp. 504.087.040.444

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 yaitu sebagai berikut, tahun 2007 pendapatan asli daerah pada anggaran perubahan yaitu sebesar Rp.12.494.880,000, setelah direalisasikan mengalami kenaikan sebesar Rp.15.876.986.979. Pada dana perimbangan anggaran perubahan yaitu sebesar Rp.286.183.761242 direalisasikan mengalami kenaikan sebesar Rp.307.157.452.404, lain-lain pendapatan yang sah dari Rp.0 direalisasikan menjadi Rp.964.615.000.

Pada anggaran perubahan jumlah pendapatan Rp.314.466.843.142 direalisasikan menjadi Rp.350.737.785.305. Belanja tidak langsung anggaran perubahan yaitu Rp.212.898.687.251 setelah direalisasikan mengalami penurunan menjadi Rp.165.560.207.225 dan belanja langsung anggaran perubahan yaitu Rp.238.471.483.373 direalisasikan menjadi Rp.160.249.289.688 dan mengalami penurunan juga. Jumlah belanja pada tahun 2007 dianggaran perubahan sebesar Rp.452.870.170.624 direalisasikan turun menjadi Rp.325.809.496.913.

Tahun 2008, pendapatan asli daerah anggaran perubahan sebesar Rp.15.330.580.000 direalisasikan sebesar Rp.16.457.792.428, dana perimbangan anggaran perubahan sebesar Rp.351.521.316.472 direalisasikan sebesar Rp.362.860.671.755 mengalami kenaikkan, lain-lain pendapatan yang sah anggaran perubahan Rp.17.927.291.313 direalisasikan sebesar Rp.18.596.354.399 mengalami kenaikkan, pada jumlah pendapatan anggaran perubahan Rp.384.779.187.785 direalisasikan saebasar Rp.397.914.818.582. Belanja tidak langsung mengalami penurunan, anggaran perubahan Rp.280.326.333.473

direalisasikan sebesar Rp.232.322.684.103 dan belanja langsung juga mengalami penurunan, anggaran perubahan Rp.268.140.660.186 direalisasikan sebesar Rp.222.206.542.085. Tahun 2008 jumlah belanja pada anggaran perubahan sebesar Rp.550.966.993.659 dan realisasi menurun sebesar Rp.456.262.926.188

Tahun 2009 perubahan alokasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikkan dari Rp.16.825.580.000 menjadi Rp.19.198.580.000, dan direalisasikan sebesar Rp.21.713.639.281. Perubahan alokasi dana perimbangan mengalami kenaikkan dari Rp.373.650.744.981 menjadi Rp.376.888.135.548 dan saat direalisasikan menurun sebesar Rp.347.911.209.665. Perubahan alokasi lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikkan dari Rp.22.775.040.000 menjadi Rp.30.045.064.627 direalisasikan menurun sebesar Rp.25.049.345.309. Perubahan alokasi jumlah pendapatan tahun 2009 anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp.413.251.365.281 naik menjadi Rp.426.131.780.175 pada anggaran perubahan dan menurun saat direalisasikan sebesar Rp.394.677.194.255.

Pada perubahan alokasi belanja tidak langsung, anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp.172.015.512.581 pada anggaran perubahan menurun sebesar Rp.169.502.087.585 dan menurun kembali saat direalisasikan sebesar Rp.157.290.720.755, sedangkan belanja langsung menurun dari sebesar Rp.328.235.852.700 menjadi Rp.362.968.534.943 di anggaran perubahan dan realisasi bertambah turun sebesar Rp.323.007526.119. Jumlah belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp.500.251.365.281, sedangakan

Tahun 2011 perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagai berikut ; pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendapatan asli daerah sebesar Rp.26.877.233.067 mengalami kenaikkan sebesar Rp.25.355.428.131 di perubahan anggaran dan saat realisasi bertambah naik sebasar Rp.30.107.805.653. Dana perimbangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp.483.288.017.405 mengalami penurunan sebesar Rp.440.740.145.312 pada perubahan anggaran dan realisasi naik menjadi Rp.464.066.305.389.

Lain-lain pendapatan yang sah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp.41.347.374.480 mengalami kenaikkan sebesar Rp.70.624.789.851 pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi bertambah naik sebesar Rp.78.894.281.653. Perubahan alokasi jumlah pendapatan tahun 2011 pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu sebesar Rp.551.512.624.952 mengalami penurunan sebesar Rp.536.720.363.294 pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi naik menjadi Rp.575.068.392.695.

Belanja tidak langsung, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp.274.963.492.884 mengalami penurunan sebesar Rp.238.369.345.218 pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi bertambah menurun sebesar Rp.229.580.017.088. Belanja langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp.294.049.132.068 mengalami penurunan sebesar Rp.283.172.458.226 saat perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi bertambah turun menjadi Rp.274.507.023.356.

Perubahan alokasi jumlah belanja tahun 2011 pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu sebesar Rp.569.012.624.952 mengalami penurunan sebesar Rp.521.541.803.444 pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi bertambah turun menjadi Rp.504.087.040.444.

Keadaan ini akan mempengaruhi tujuan program-program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kota Prabumulih. Dari data diatas dapat dilihat pendapatan pajak daerah dan belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih mengalamai penurunan dan kenaikan yang sangat signifikan, ini disebabkan karena kurangnya wajib pajak yang melakukan kewajibannya membayar pajak dan banyaknya belanja tidak langsung pegawai, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik IV.I

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kota Prabumulih

Tahun 2007-2011

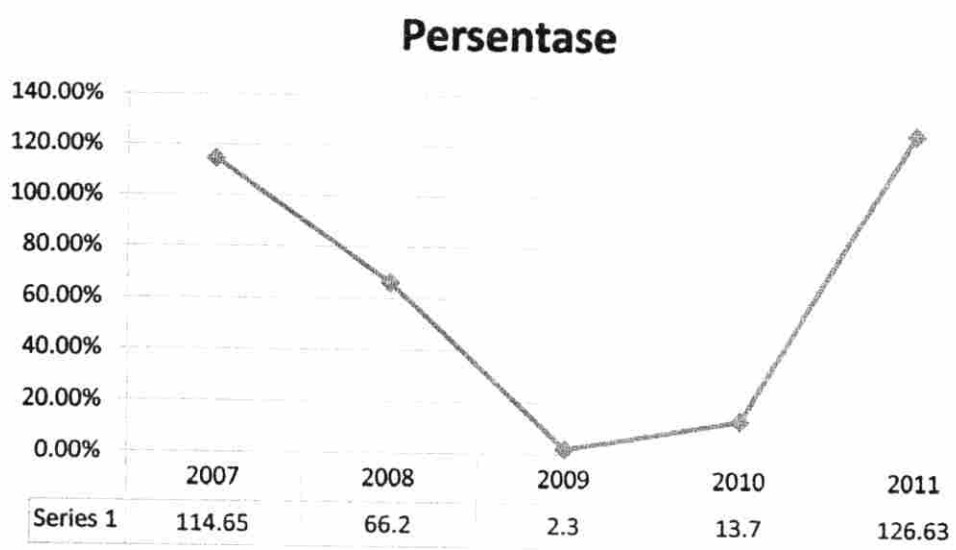

Persentase alokasi anggaran pendapatan pajak daerah kota Prabumulih yaitu :

1) Pada tahun 2007 alokasi realisasi anggaran pendapatan pajak daerah kota Prabumulih sebesar Rp. 3.376.075.393. Bertambah 114,65% dari anggaran perubahan APBD.
2) Pada tahun 2008 alokasi realisasi anggaran pendapatan pajak daerah kota Prabumulih sebesar Rp. 5.210.793.591. Bertambah 66,2% dari anggaran perubahan APBD.
3) Pada tahun 2009 alokasi realisasi anggaran pendapatan pajak daerah kota Prabumulih sebesar Rp. 5.201.416209. Berkurang 2,3% dari anggaran perubahan APBD.
4) Pada tahun 2010 alokasi realisasi anggaran pendapatan pajak daerah kota Prabumulih sebesar Rp. 6.171.585.652. Bertambah 13,7% dari anggaran perubahan APBD.
5) Pada tahun 2011 alokasi realisasi anggaran pendapatan pajak daerah kota Prabumulih sebesar Rp. 32.107.805.653. Bertambah 126,63% dari anggaran perubahan APBD.

Grafik IV.II

Anggaran Belanja Tidak Langsung Pegawai Kota Prabumulih

Tahun 2007-2011

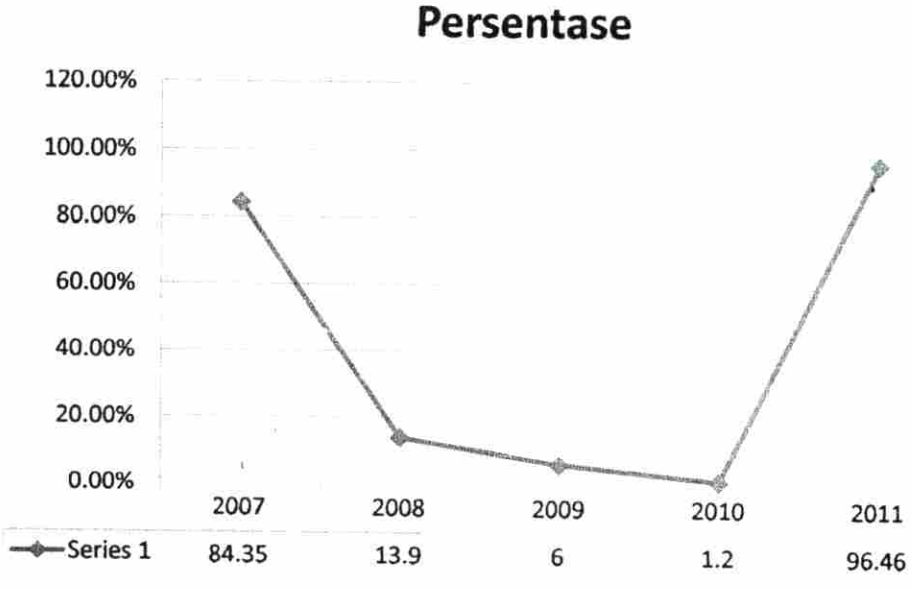

Persentase alokasi anggaran belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih yaitu :

1) Pada tahun 2007 alokasi realisasi anggaran belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih sebesar Rp. 97.686.701.424. Berkurang 84,35% dari anggaran perubahan APBD.
2) Pada tahun 2008 alokasi realisasi anggaran belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih sebesar Rp. 136.234.980.192. Berkurang 13,9% dari anggaran perubahan APBD.
3) Pada tahun 2009 alokasi realisasi anggaran belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih sebesar Rp. 142.517.829.650. Berkurang 6,0% dari anggaran perubahan APBD.

4) Pada tahun 2010 alokasi realisasi anggaran belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih sebesar Rp. 184.255.477.761. Berkurang 1,2% dari anggaran perubahan APBD.

5) Pada tahun 2011 alokasi realisasi anggaran belanja tidak langsung pegawai kota Prabumulih sebesar Rp. 207.308.906.686. Berkurang 96,46% dari anggaran perubahan APBD.

2. Efektifitas dan Efisiensi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih

a) Tingkat Efektifitas

Efektifitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang dtargatkan dengan realisasinya. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Analisis efektifitas alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 sudah efektif atau belum. Dalam menganalisis alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih ini, tolak ukur yang digunakan atau sesuai dengan indikator efektifitas ini membandingkan target penerimaan dengan realisasi pendapatan dikalikan 100%.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \text{X } 100\%$$

Melalui rumus diatas dapat dilakukan analisis tingkat efektifitas alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2009

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun 2009, pendapatan asli daerah sebesar Rp. 16.825.580.000 dan realisasinya Rp. 21.713.639.281. Dana perimbangan sebesar Rp. Rp.373.650.744.981 dan realisasi sebesar Rp.347.911.209.665. Lian-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.22.775.040.000 dan realisasi sebesar Rp.25.049.345.309. belanja tidak langsung Rp.172.015.512.581 dan realisasi sebesar Rp.157.290.720.755, sedangkan belanja langsung sebesar Rp.328.235.852.700 dan realisasi sebesar Rp.323.007526.119.

Tingkat efektifitas alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2009 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Efekrifitas} = \frac{\text{Rp.16.825.580.000}}{\text{Rp.21.713.639.281}} \text{ X } 100\%$$

$$= 77{,}4\%$$

2. Dana Perimbangan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.373.650.744.981}}{\text{Rp.347.911.209.665}} \text{ X } 100\%$$

$$= 107{,}3\%$$

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.22.775.040.000}}{\text{Rp.25.049.345.300}} \text{ X } 100\%$$

$$= 90{,}9\%$$

4. Belanja Tidak Langsung

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.172.015.512.581}}{\text{Rp.157.290.720.755}} \text{ X } 100\%$$

$$= 109{,}3\%$$

5. Belanja Langsung

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.328.235.852.700}}{\text{Rp.323.007.526.119}} \text{ X } 100\%$$

$$= 101{,}6\%$$

Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka tidak efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% maka efektifitas berimbang dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka sudah efektif. Artinya pada tahun 2009 tingkat alokasi pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan pada pendapatan asli daerah sebesar 77,4% belum efektif, dana perimbangan sebesar 107,3% sudah efektif, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 90,9% belum efektif, belanja tidak langsung sebesar 109,3% sudah efektif, dan belanja langsung sebesar 101,6% sudah efektif.

b. Tahun 2010

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun 2010 pendapatan asli daerah sebesar Rp.21.145.580.000 dan realisasi sebesar Rp.25.215.405.648. Dana perimbangan sebesar Rp.388.750.635.661 dan realisasi sebesar Rp.387.376.410.588. Lain-lain pendapatan sebesar Rp.26.382.564.514 dan realisasi sebesar Rp.78.777.084.228. Belanja tidak langsung sebesar Rp.171.119.335.594 dan realisasi sebesar Rp.197.826.470.998. Belanja langsung sebesar Rp.288.959.444.581, dan realisasi sebesar Rp.297.672.233.882.

Tingkat efektifitas alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2010 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Efekrifitas} = \frac{\text{Rp.21.145.580.000}}{\text{Rp.25.215.405.648}} \text{X100\%}$$

$$= c$$

2. Dana Perimbangan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.388.750.635.661}}{\text{Rp.387.376.410.588}} \text{ X 100\%}$$

$$= 100\%$$

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.26.382.564.514}}{\text{Rp.78.777.084.228}} \text{ X 100\%}$$

= 33,4%

4. Belanja Tidak Langsung

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.171.119.335.594}}{\text{Rp.197.826.470.998}} \text{ X } 100\%$$

= 86,4%

5. Belanja Langsung

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.288.959.444.581}}{\text{Rp.297.672.233.882}} \text{ X } 100\%$$

= 97%

Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka tidak efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% maka efektifitas berimbang dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka sudah efektif. Artinya pada tahun 2010 tingkat alokasi pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan pada pendapatan asli daerah sebesar 82,8% belum efektif, dana perimbangan sebesar 100% berimbang, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 33,4% belum efektif, belanja tidak langsung sebesar 86,4% belum efektif, dan belanja langsung sebesar 97% belum efektif.

c. Tahun 2011

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun 2011 pendapatan asli daerah sebesar Rp.26.877.233.067 dan realisasi sebasar Rp.30.107.805.653. Dana perimbangan sebesar Rp.483.288.017.405 dan realisasi Rp.464.066.305.389. Lain-lain

pendapatan yang sah sebesar Rp.41.347.374.480 dan realisasi sebesar Rp.78.894.281.653. Belanja tidak langsung sebesar Rp.274.963.492.884 dan realisasi sebesar Rp.229.580.017.088. Belanja langsung sebesar Rp.294.049.132.068 dan realisasi Rp.274.507.023.356.

Tingkat efektifitas alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2011 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Efekrifitas} = \frac{\text{Rp.26.877.233.067}}{\text{Rp.30.107.805.653}} \text{X100\%}$$

$$= 89{,}2\%$$

2. Dana Perimbangan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.483.288.017.405}}{\text{Rp.464.066.305.389}} \text{ X 100\%}$$

$$= 104{,}1\%$$

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.41.347.374.480}}{\text{Rp.78.894.281.653}} \text{ X 100\%}$$

$$= 52{,}4\%$$

4. Belanja Tidak Langsung

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.274.963.492.884}}{\text{Rp.229.580.017.088}} \text{ X 100\%}$$

$$= 119{,}7\%$$

5. Belanja Langsung

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp.294.049.132.068}}{\text{Rp.274.507.023.356}} \text{ X } 100\%$$

$$= 107{,}1\%$$

Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai kurang dari 100% maka tidak efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektifitas berimbang dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% sudah efektif. Artinya pada tahun 2011 tingkat alokasi pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan pada pendapatan asli daerah sebesar 89,2% belum efektif, dana perimbangan sebesar 104,1% sudah efektif, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 52,4% belum efektif, belanja tidak langsung sebesar 119,7% sudah efektif, dan belanja langsung sebesar 107,1% sudah efektif.

b) Tingkat efesiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah guna untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*speding well*).

Dalam menganalisis alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 ini, tolak ukur yang digunakan atau

sesuai dengan indikator efisiensi adalah membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan.

Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 untuk memperoleh pendapatan harus mengeluarkan biaya yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \text{ X } 100\%$$

Melalui rumus diatas dapat dilakukan analisis tingkat efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2007

Realisasi belanja pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun anggaran 2007 ditetapkan sebesar Rp.325.809.496.913 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.350.737.785.305 . Maka tingkat efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2007 adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp.325.809.496.913}}{\text{Rp.350.737.785.305}} \text{X}100\%$$

$$= 92{,}8\%$$

Artinya pada anggaran tahun 2007, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah sebesar 92,8%. Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai kurang dari 100%

berarti alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih sudah efisien.

b. Tahun 2008

Realisasi belanja pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp.456.262.926.188 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.397.914.818.582. Maka tingkat efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2008 adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp.456.262.926.188}}{\text{Rp.397.914.818.582}} \text{X100\%}$$

$$= 114{,}6\%$$

Artinya pada anggaran tahun 2008, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah sebesar 114,6%. Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tidak efisien.

c. Tahun 2009

Realisasi belanja pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.480.298.246.874 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.394.677.194.255. Maka tingkat efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2009 adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp.480.298.246.874}}{\text{Rp.394.677.194.255}} \text{X100\%}$$

$$= 121{,}6\%$$

Artinya pada anggaran tahun 2009, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah sebesar 121,6%. Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tidak efisien.

d. Tahun 2010

Realisasi belanja pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp.495.498704.880 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.491.368.900.465. Maka tingkat efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2010 adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp.495.498.704.880}}{\text{Rp.491.368.900.465}} \text{X } 100\%$$

$$= 100\%$$

Artinya pada anggaran tahun 2010, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah sebesar 100%. Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih efisien berimbang.

e. Tahun 2011

Realisasi belanja pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih pada tahun anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp.504.087.040.444 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.575.068.392.695. Maka tingkat efisiensi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2011 adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rp.504.087.040.444}}{\text{Rp.575.068.392.695}} \text{ X } 100\%$$

$$= 87{,}6\%$$

Artinya pada anggaran tahun 2011, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah sebesar 87,6%. Berdasarkan kriteria diatas jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih sudah efisien.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 mengalami kenaikkaan dan penurunan, serta banyaknya pendapatan daerah yang belum efektif dan juga belanja daerah yang belum efisien. Hal ini disebabkan pemerintah yang beranggapan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah efektif dan efisien, padahal alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Prabumulih tahun 2007-2011 masih belum efektif dan efisien

Belum tercapainya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan pendapatan daerah yang mengalami penurunan seperti pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010 belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga mengalami devisid, sedangkan pada tahun 2007 dan 2011 mengalami *saving* atau kelebihan pendapatan.

Keadaan ini akan mempengaruhi program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Prabumulih dan juga pada penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), apabila sisa lebih perhitungan anggaran dipakai terus menerus untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) akan habis.

B. Saran

Dari semua kesimpulan di atas, maka pada bagian ini penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan masukan untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian.
2. Peningkatan kinerja SDM yang professional dan berakhlakul karimah : jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan.
3. Memperbaiki sistem manajemen yang kurang baik meliputi koordinasi penyusunan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Selemba Empat,Jakarta.

Lin, Nan, Alih Bahasa W. Gulo. 2000. **Metodologi Penelitian**, Cetakan Ketiga, PT. Grasindo, Jakarta.

Mahmudi. 2011. **Akuntansi Sektor Publik,** Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Iqbal Hasan. 2003. **Materi Statistik**, Edisi Kedua, Bumi Aksara,Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supono. 2004. **Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta.

Sugiyono. 2006. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kesembilan CV. Alvabeta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDAPATAN PENGOLAHAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jendral Sudirman KM. 12 Kecamatan Cambai
Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31141
Telp. (0713) 3920011 Fax. (0713) 3920019
Website: http://www.kotaprabumulih.go.id

Prabumulih, 21 November 2012

Nomor : 050/ 07/DPPKAD/2012

Lampiran : -

Perihal : Keterangan telah melaksanakan pengambilan data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

di
PALEMBANG

Sehubungan dengan surat yang diterima untuk melaksanakan pengambilan data di Dinas Pendapatan Pengolahan, Keuangan dan Aset Daerah di Kota Prabumulih.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : FITRI NURHADI
NIM : 22 2007 148
Judul Penelitian : Analisis Perubahan Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007-2011.

Telah selesai melaksanakan pengambilan data di Dinas Pendapatan Pengolahan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD

Drs. Ujang Sukarman, SE. AK. MM
NIP. 195412161978031001

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

S E R T I F I K A T

293/J-10/FE-UMP/SHA/VIII/2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

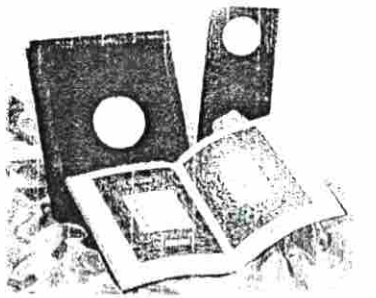

NAMA : FITRI NURHADI
NIM : 222007148
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat CUKUP MEMUASKAN

Palembang, 04 Agustus 2012

Unggul dan Islami

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
Fitri Nurhadi	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	8-May-1989	27-Jul-2012

EXAMINEE'S NUMBER
1375

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	40	41	420

DATE OF REPORT
31/07/2012

Prof. Dr. Indawan Syahri,M.Pd.
Consultant

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Fitri Nurhadi	PEMBIMBING	
NIM :	22 2007 148	KETUA :	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
JURUSAN :	Akuntansi	ANGGOTA :	

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007-2011

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	3/8/2012	bab 1,2,3			perbaiki
2	3/8/2012	Bab 4			perbaiki
3	4/8/2012	Bab . 4			Lengkapi di Acc disamak
4	30/11/2012	data			Perbaiki !
5	6/11/2012	data			Perbaiki !
6	15/12/2012	bab 4 - 1, 2			Perbaiki !
7	18/12/2012	Bab 5			Perbaiki !
8	21/12/2012	dgt pst + Acc			di Acc diujikan
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Rosalina Ghazali, S.E. Ak. MSi

Created by : J@y_PPUMP'05-06

Biodata Penulis

Nama	: Fitri Nurhadi
Tempat/Tanggal Lahir	: Prabumulih, 08 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Kop. A. Wahab Gang Pertiwi No. 75 RT/RW 010/002 Prabumulih Barat
Hp	: 085789394209
Nama Orang Tua	
Ayah	: Marsidi
Ibu	: Maryam
Pekerjaan Orang Tua	
Ayah	: Kontraktor MBP
Ibu	: Guru
Alamat Orang Tua	: Jln. Kop. A. Wahab Gang Pertiwi No.75 RT/RW 010/002 Prabumulih Barat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN
JURUSAN MANAJEMEN (S1)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN
No. 3619/D/T/K-II/2010
No. 3620/D/T/K-II/2010
No. 3377/D/T/K-II/2009

AKREDITASI
No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)
No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	: Jum'at, 28 Desember 2012
Waktu	: 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama	: Fitri Nurhadi
NIM	: 22 2007 148
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: ANALISIS PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2007 – 2011

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Fahmi, S.E, M.Si	Pembimbing	5/1 -/2013.	
2	M. Taufik Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	3/1 - 13	
3	Mizan, S.E., M.Si., Ak.	Penguji I	5/1 2013	
4	M. Fahmi, S.E, M.Si	Penguji II	5/1 /2013.	

Palembang, Januari 2012
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007

g	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2007	(%)
	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 2.944.580.000,00	Rp 3.376.075.393,00	114,65%
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 3.313.100.000,00	Rp 2.623.450.403,00	79,18%
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 200.000.000,00	Rp 346.747.973,00	173,37%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 6.037.200.000,00	Rp 9.530.713.210,00	157,87%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**Rp 12.494.880.000,00**	**Rp 15.876.986.979,00**	**127,07%**
	PENDAPATAN TRANSFER			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 49.617.959.000,00	Rp 61.685.020.963,00	124,32%
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 54.858.802.242,00	Rp 70.703.831.441,00	128,88%
	Dana Alokasi Umum	Rp 161.515.000.000,00	Rp 161.515.000.000,00	100,00%
	Dana Alokasi Khusus	Rp 20.192.000.000,00	Rp 13.253.600.000,00	65,64%
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**Rp 286.183.761.242,00**	**Rp 307.157.452.404,00**	**107,33%**
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
	Dana Otonomi Khusus	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Dana Penyesuaian	Rp 4.400.000.000,00	Rp 1.320.000.000,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**Rp 4.400.000.000,00**	**Rp 1.320.000.000,00**	**0,00%**
	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 11.388.201.900,00	Rp 25.418.730.322,58	223,20%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	**Rp 11.388.201.900,00**	**Rp 25.418.730.322,58**	**223,20%**
	Jumlah Pendapatan Transfer	**Rp 301.971.963.142,00**	**Rp 333.896.182.726,58**	**110,57%**
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Pendapatan Dana Darurat	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Pendapatan Lainnya	Rp 0,00	Rp 964.615.600,00	0,00%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	**Rp 0,00**	**Rp 964.615.600,00**	**0,00%**
	JUMLAH PENDAPATAN	**Rp 314.466.843.142,00**	**Rp 350.737.785.305,58**	**111,53%**
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	Rp 115.817.937.819,00	Rp 97.686.701.424,00	84,35%
	Belanja Barang	Rp 80.070.207.594,00	Rp 54.575.270.358,85	68,16%
	Bunga	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Subsidi	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Hibah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	Bantuan Sosial	Rp 15.280.041.838,00	Rp 13.102.949.043,00	85,75%
	Bantuan Keuangan	Rp 1.730.500.000,00	Rp 195.286.400,00	11,28%
	Jumlah Belanja Operasi	**Rp 212.898.687.251,00**	**Rp 165.560.207.225,85**	**77,76%**
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah	Rp 4.306.531.018,00	Rp 978.012.000,00	22,71%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 103.586.163.385,00	Rp 69.000.038.808,00	66,61%
	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 96.957.753.222,00	Rp 69.178.655.978,00	71,35%
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 32.993.595.748,00	Rp 20.635.615.902,00	62,54%

2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	627.440.000,00	Rp	456.967.000,00	72,83%
2.6.	Belanja Aset Lainnya	Rp	0,00	Rp	0,00	0,00%
	Jumlah Belanja Modal	Rp	**238.471.483.373,00**	Rp	160.249.289.688,00	**67,20%**
.3.	**BELANJA TAK TERDUGA**					
3.1.	Belanja Tak Terduga	Rp	1.500.000.000,00	Rp	0,00	0,00%
	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	**1.500.000.000,00**	Rp	0,00	**0,00%**
	JUMLAH BELANJA	Rp	**452.870.170.624,00**	Rp	325.809.496.913,85	**71,94%**
3	**TRANSFER**					
.1	**TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA**					
1.1	Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	Rp	1.955.000.000,00	Rp	1.196.650.000,00	0,00%
1.3	Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	Rp	0,00	Rp	0,00	0,00%
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa	Rp	1.955.000.000,00	Rp	1.196.650.000,00	**0,00%**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp	**454.825.170.624,00**	Rp	327.006.146.913,85	**71,90%**
	SURPLUS/DEFISIT	Rp	(140.358.327.482,00)	Rp	23.731.638.391,73	**-16,91%**
5.	**PEMBIAYAAN**					
.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
1.1.	Penggunaan SiLPA	Rp	144.956.167.482,00	Rp	144.956.167.482,67	100,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	**144.956.167.482,00**	Rp	144.956.167.482,67	**100,00%**
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	0,00	Rp	0,00	0,00%
2.6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	3.500.000.000,00	Rp	2.000.000.000,00	57,14%
2.7	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp	350.000.000,00	Rp	0,00	0,00%
2.8	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	747.840.000,00	Rp	0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	**4.597.840.000,00**	Rp	2.000.000.000,00	**43,50%**
	PEMBIAYAAN NETO	Rp	**140.358.327.482,00**	Rp	142.956.167.482,67	**101,85%**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp	**0,00**	Rp	166.687.805.874,40	-

an atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok.

Prabumulih, 2008
Walikota Prabumulih.

Drs. H. Rachman Djalili, MM

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2008

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah				
Pajak Daerah	15.330.580.000	16.457.792.428	1.127.212.428	7,3
Hasil Retribusi Daerah	3.134.080.000	5.210.793.591	2.076.713.591	66,2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.209.500.000	3.182.583.024	(26.916.976)	(0,8)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	200.000.000	528.193.190	328.193.190	164,0
Pendapatan Transfer	8.787.000.000	7.536.222.622	(1.250.777.378)	(14,2)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	351.521.316.472	362.860.671.755	11.339.355.283	3,2
1 Bagi Hasil Pajak	351.521.316.472	362.860.671.755	11.339.355.283	3,2
2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	66.965.277.872	56.605.686.717	(10.359.591.155)	(15,4)
3 Dana Alokasi Umum	72.916.166.000	95.705.558.038	22.789.392.038	31,2
4 Dana Alokasi Khusus	182.026.272.600	180.935.827.000	(1.090.445.600)	(0,5)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	29.613.600.000	29.613.600.000	0	0,0
Dana Penyesuaian	0	0	0	0,0
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0,0
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0,0
Pendapatan Hibah	17.927.291.313	18.596.354.399	669.063.086	3,7
Dana Darurat	0	0	0	0,0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0,0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.927.291.313	17.484.718.904	(442.572.409)	(2,4)
Penerimaan Lain-lain	0	0	0	0,0
	0	1.111.635.495	1.111.635.495	-
Jumlah Pendapatan	384.779.187.785	397.914.818.582	13.135.630.797	3,4
Belanja				
Belanja Operasi	280.326.333.473	232.322.684.103	(48.003.649.370)	(17,1)
Belanja Pegawai	158.357.977.511	136.234.980.192	(22.122.997.319)	(13,9)
Belanja Barang	86.719.185.012	66.059.964.310	(20.659.220.702)	(23,8)
Belanja Bunga	0	0	0	0,0
Belanja Subsidi	0	0	0	0,0
Belanja Hibah	9.362.250.000	7.705.538.401	(1.656.711.599)	(17,6)
Belanja Bantuan Sosial	23.266.920.950	20.637.201.200	(2.629.719.750)	(11,3)
Belanja Bantuan Keuangan	2.620.000.000	1.685.000.000	(935.000.000)	(35,6)
Belanja Modal	268.140.660.186	222.206.542.085	(45.934.118.101)	(17,1)
Belanja Tanah	1.500.000.000	1.464.480.000	(35.520.000)	(2,3)
Belanja Peralatan Dan Mesin	30.361.259.872	20.404.918.907	(9.956.340.965)	(32,7)
Belanja Gedung Dan Bangunan	83.911.795.219	68.325.569.656	(15.586.225.563)	(18,5)
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	151.556.178.295	131.241.491.322	(20.314.686.973)	(13,4)
Belanja Aset Tetap Lainnya	811.426.800	770.082.200	(41.344.600)	(5,0)
Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	(500.000.000)	(100,0)
Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	(500.000.000)	(100,0)
Transfer	2.000.000.000	1.733.700.000	(266.300.000)	(13,3)
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/kota	2.000.000.000	1.733.700.000	(266.300.000)	(13,3)
Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/kota	0	0	0	0,0
Jumlah Belanja	550.966.993.659	456.262.926.188	(94.704.067.471)	(17,1)
Surplus/ Defisit	(166.187.805.874)	(58.348.107.606)	107.839.698.268	(64,8)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	166.687.805.874	166.687.805.874	0	0,0
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (S I L P A)	166.687.805.874	166.687.805.874	0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0	0	0	0,0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,0

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0,0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0,0
Jumlah	166.687.805.874	166.687.805.874	0	0,0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000	0	(500.000.000)	(100,0)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0,0
Pembayaran Pokok Utang	500.000.000	0	(500.000.000)	(100,0)
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
Jumlah	500.000.000	0	(500.000.000)	(100,0)
Pembiayaan Netto	166.187.805.874	166.687.805.874	500.000.000	0,3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (S I L P A)	0	108.339.698.268	108.339.698.268	

Prabumulih , 09 Juli 2009

WALIKOTA

DRS. H. RACHMAN DJALILI, MM.

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	19.198.580.000	21.713.639.281	2.515.059.281	13,1
Pajak Daerah	5.326.080.000	5.201.416.209	(124.663.791)	(2,3)
Hasil Retribusi Daerah	3.315.500.000	4.054.675.956	739.175.956	22,2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	250.000.000	718.981.815	468.981.815	187,5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.307.000.000	11.738.565.301	1.431.565.301	13,8
Dana Perimbangan	376.888.135.548	347.914.209.665	(28.973.925.883)	(7,6)
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	155.743.200.548	126.783.874.665	(28.959.325.883)	(18,5)
Dana Alokasi Umum	187.553.335.000	187.553.335.000	0	0,0
Dana Alokasi Khusus	33.591.600.000	33.577.000.000	(14.600.000)	(0,0)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.045.064.627	25.049.345.309	(4.995.719.318)	(16,6)
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,0
Dana Darurat	0	0	0	0,0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.045.064.627	19.956.890.712	(10.088.173.915)	(33,5)
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0	0	0	0,0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0,0
Penerimaan Yang Lain-lain	0	5.092.454.597	5.092.454.597	~
Jumlah Pendapatan	**426.131.780.175**	**394.677.194.255**	**(31.454.585.920)**	**(7,3)**
Belanja				
Belanja Tidak Langsung	169.502.087.585	157.290.720.755	(12.211.366.830)	(7,2)
Belanja Pegawai	151.702.087.585	142.517.829.650	(9.184.257.935)	(6,0)
Belanja Bunga	0	0	0	0,0
Belanja Subsidi	0	0	0	0,0
Belanja Hibah	7.305.000.000	6.747.104.500	(557.895.500)	(7,6)
Belanja Bantuan Sosial	9.995.000.000	8.025.786.605	(1.969.213.395)	(19,7)
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0	0	0	0,0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0,0
Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	(500.000.000)	(100,0)
Belanja Langsung	362.968.534.943	323.007.526.119	(39.961.008.824)	(11,0)
Belanja Pegawai	30.572.161.840	26.482.724.265	(4.089.437.575)	(13,3)
Belanja Barang Dan Jasa	106.257.743.521	90.562.069.485	(15.695.674.036)	(14,7)
Belanja Modal	226.138.629.582	205.962.732.369	(20.175.897.213)	(8,9)
Jumlah Belanja	**532.470.622.528**	**480.298.246.874**	**(52.172.375.654)**	**(9,7)**
Surplus/ (defisit)	**(106.338.842.353)**	**(85.621.052.619)**	**20.717.789.734**	**(19,4)**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	108.338.842.353	107.775.842.353	(563.000.000)	(0,5)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (S I L P A)	108.338.842.353	107.775.842.353	(563.000.000)	(0,5)
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0	0	0	0,0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0,0

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0,0
Jumlah	108.338.842.353	107.775.842.353	(563.000.000)	(0,5)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	(100,0)
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	(100,0)
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0,0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,0
Jumlah	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	(100,0)
Pembiayaan Netto	106.338.842.353	107.775.842.353	1.437.000.000	1,3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	22.154.789.734	22.154.789.734	-

Prabumulih , 11 September 2010

WALIKOTA PRABUMULIH

DRS. H. RACHMAN DJALILI, MM

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	**26.973.357.885,00**	**25.215.405.648,15**	**(1.757.952.236,85)**	**(6,5)**
Pajak Daerah	5.426.080.000,00	6.171.585.652,64	745.505.652,64	13,7
Hasil Retribusi Daerah	4.047.500.000,00	2.305.102.200,00	(1.742.397.800,00)	(43,0)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	700.000.000,00	749.110.099,51	49.110.099,51	7,0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.799.777.885,00	15.989.607.696,00	(810.170.189,00)	(4,8)
Dana Perimbangan	**384.203.363.610,00**	**387.376.410.588,00**	**3.173.046.978,00**	**0,8**
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	176.999.743.610,00	180.172.790.588,00	3.173.046.978,00	1,7
Dana Alokasi Umum	188.426.720.000,00	188.426.720.000,00	0,00	0,0
Dana Alokasi Khusus	18.776.900.000,00	18.776.900.000,00	0,00	0,0
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**90.742.994.367,00**	**76.777.084.220,95**	**(11.965.910.138,05)**	**(13,1)**
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,0
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.570.759.035,00	23.900.492.000,00	(6.670.267.035,00)	(21,8)
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.500.000.000,00	2.382.066.000,00	(117.934.000,00)	(4,7)
Dana Penguatan Dan Percepatan Pembangunan	45.217.959.132,00	39.782.959.132,00	(5.435.000.000,00)	(12,0)
Dana Tunjangan Profesi Guru	12.454.276.200,00	12.418.201.200,00	(36.075.000,00)	(0,2)
Penerimaan Lain-lain	0,00	293.365.896,95	293.365.896,95	-
Jumlah Pendapatan	**501.919.715.862,00**	**491.368.900.465,10**	**(10.550.815.396,90**	**(2,1)**
Belanja				
Belanja Tidak Langsung	**209.532.897.499,00**	**197.826.470.998,00**	**(2.706.426.501,00)**	**(1,3)**
Belanja Pegawai	186.559.897.499,00	184.255.477.761,00	(2.304.419.738,00)	(1,2)
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Hibah	5.610.000.000,00	5.378.280.830,00	(231.719.170,00)	(4,1)
Belanja Bantuan Sosial	8.363.000.000,00	8.192.712.407,00	(170.287.593,00)	(2,0)
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Langsung	**323.541.608.097,00**	**297.672.233.882,00**	**(25.869.374.215,00)**	**(7,9)**
Belanja Pegawai	24.856.156.503,00	22.797.410.858,00	(2.058.745.645,00)	(8,2)
Belanja Barang Dan Jasa	97.207.820.210,00	88.975.339.698,00	(8.232.480.312,00)	(8,4)
Belanja Modal	201.477.631.384,00	185.899.483.126,00	(15.578.148.258,00)	(7,7)
Jumlah Belanja	**524.074.505.596,00**	**495.498.704.880,00**	**(28.575.800.716,00)**	**(5,4)**
Surplus/ (defisit)	**(22.154.789.734,00)**	**(4.129.804.414,90)**	**18.024.985.319,10**	**(81,3)**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	22.154.789.734,00	22.154.789.734,67	0,00	0,0
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (S I L P A)	22.154.789.734,00	22.154.789.734,67	0,00	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,0

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,0
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah	22.154.789.734,00	22.154.789.734,67	0,00	0,0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,0
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,0
Pembiayaan Netto	22.154.789.734,00	22.154.789.734,67	0,00	0,0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	18.024.985.319,77	18.024.985.319,77	

Prabumulih, 28 Juni 2011

WALIKOTA PRABUMULIH

DRS. H. RACHMAN DJALILI, MM

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	536.720.363.294,00	575.068.392.695,99	38.348.029.401,99	107,14
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	25.355.428.131,00	32.107.805.653,99	6.752.377.522,99	126,63
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.637.500.000,00	9.798.712.170,00	2.161.212.170,00	128,30
1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.884.000.000,00	2.201.003.313,00	(682.996.687,00)	76,32
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	700.000.000,00	940.224.286,77	240.224.286,77	134,32
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.133.928.131,00	19.167.865.884,22	5.033.937.753,22	135,62
2	**DANA PERIMBANGAN**	440.740.145.312,00	464.066.305.389,00	23.326.160.077,00	105,29
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	170.493.668.312,00	193.942.719.389,00	23.449.051.077,00	113,75
2.2	Dana Alokasi Umum	247.679.377.000,00	247.557.086.000,00	(122.291.000,00)	99,95
2.3	Dana Alokasi Khusus	22.567.100.000,00	22.566.500.000,00	(600.000,00)	100,00
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	70.624.789.851,00	78.894.281.653,00	8.269.491.802,00	111,71
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	13.996.035.000,00	13.996.035.000,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.999.012.357,00	21.513.283.907,00	(5.485.728.450,00)	79,68
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.017.675.000,00	13.304.250.000,00	286.575.000,00	102,20
3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.813.642.014,00	6.286.252.266,00	(527.389.748,00)	92,26
3.7	Dana Tunjangan Profesi Guru	19.577.925.480,00	19.577.925.480,00	0,00	100,00
3.10	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	4.216.535.000,00	4.216.535.000,00	0,00	100,00
	BELANJA	521.541.803.444,00	504.087.040.444,20	(17.454.762.999,80)	96,65
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	238.369.345.218,00	229.580.017.088,00	(8.789.328.130,00)	96,31
1.1	Belanja Pegawai	214.918.789.218,00	207.308.906.686,00	(7.609.882.532,00)	96,46
1.4	Belanja Hibah	10.278.570.000,00	9.968.450.000,00	(310.120.000,00)	96,98
1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.359.486.000,00	11.951.160.402,00	(408.325.598,00)	96,70
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	312.500.000,00	312.500.000,00	0,00	100,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	39.000.000,00	(461.000.000,00)	7,80
2	**BELANJA LANGSUNG**	283.172.458.226,00	274.507.023.356,20	(8.665.434.869,80)	96,94
2.1	Belanja Pegawai	19.928.205.400,00	18.147.657.750,00	(1.780.547.650,00)	91,07
2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.125.610.659,00	128.292.910.555,00	(14.832.700.104,00)	89,64

		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3	Belanja Modal	120.118.642.167,00	128.066.455.051,20	7.947.812.884,20	106,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.178.559.850,00	70.981.352.251,79	55.802.792.401,79	467,64
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.746.794.862,00	18.024.985.319,77	12.278.190.457,77	313,65
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5.746.794.862,00	18.024.985.319,77	12.278.190.457,77	313,65
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.925.354.712,00	20.225.354.712,00	(700.000.000,00)	96,65
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00
3	Pembayaran Pokok Utang	20.225.354.712,00	20.225.354.712,00	0,00	100,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(68.780.982.859,56)	(68.780.982.859,56)	0,00
1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(68.780.982.859,56)	(68.780.982.859,56)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(15.178.559.850,00)	(2.200.369.392,23)	12.978.190.457,77	14,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	68.780.982.859,56	68.780.982.859,56	0,00

PRABUMULIH,
WALIKOTA PRABUMULIH

H. RACHMAN DJALILI

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	16.825.580.000	19.198.580.000	2.373.000.000	14,1
Pajak Daerah	3.929.080.000	5.326.080.000	1.397.000.000	35,5
Hasil Retribusi Daerah	3.544.500.000	3.315.500.000	(229.000.000)	(6,4)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	250.000.000	250.000.000	0	0,0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.102.000.000	10.307.000.000	1.205.000.000	13,2
Dana Perimbangan	373.650.744.981	376.888.135.548	3.237.390.567	0,8
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	148.113.392.381	155.743.200.548	7.629.808.167	5,1
Dana Alokasi Umum	191.965.352.600	187.553.335.000	(4.412.017.600)	(2,2)
Dana Alokasi Khusus	33.572.000.000	33.591.600.000	19.600.000	0,0
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.775.040.300	30.045.064.627	7.270.024.327	31,9
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,0
Dana Darurat	0	0	0	0,0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.775.040.300	30.045.064.627	7.270.024.327	31,9
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0	0	0	0,0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0,0
Jumlah Pendapatan	413.251.365.281	426.131.780.175	12.880.414.894	3,1
Belanja				
Belanja Tidak Langsung	172.015.512.581	169.502.087.585	(2.513.424.996)	
Belanja Pegawai	157.115.512.581	151.702.087.585	(5.413.424.996)	(3,4)
Belanja Bunga	0	0	0	0,0
Belanja Subsidi	0	0	0	0,0
Belanja Hibah	6.830.000.000	7.305.000.000	475.000.000	6,9
Belanja Bantuan Sosial	7.570.000.000	9.995.000.000	2.425.000.000	32,0
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0	0	0	0,0
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0,0
Belanja Tidak Terduga	500.000.000	500.000.000	0	0,0
Belanja Langsung	328.235.852.700	362.968.534.943	34.732.682.243	10,5
Belanja Pegawai	30.244.587.140	30.572.161.840	327.574.700	1,0
Belanja Barang Dan Jasa	99.169.865.757	106.257.743.521	7.087.877.764	7,1
Belanja Modal	198.821.399.803	226.138.629.582	27.317.229.779	13,7
Jumlah Belanja	500.251.365.281	532.470.622.528	32.219.257.247	6,4
Surplus/ (defisit)	(87.000.000.000)	(106.338.842.353)	(19.338.842.353)	22,2
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	105.000.000.000	108.338.842.353	3.338.842.353	3,1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	105.000.000.000	108.338.842.353	3.338.842.353	3,1
Penerimaan Dana Cadangan	0	0	0	0,0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0	0	0	0,0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0,0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0,0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.000.000.000	108.338.842.353	3.338.842.353	3,1
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.000.000.000	2.000.000.000	(16.000.000.000)	88,9

- Pembentukan dana cadangan dari Penyertaan
- Penyertaan Modal Investasi pemda
- Pembayaran pokok utang
- Pemberian Pinjaman daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	2.000.000.000	(16.000.000.000)	
Pembiayaan Neto	87.000.000.000	106.338.842.353	19.338.842.353	22,2
ıiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	

Prabumulih , 09 Oktober 2009

WALIKOTA PRABUMULIH

(DRS. H. RACHMAN DJALILI, MM)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp)
4	**Pendapatan**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	21.145.580.000
4.1.1	Pajak Daerah	5.176.080.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.495.500.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	250.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.224.000.000
4.2	**Dana Perimbangan**	388.750.635.661
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	157.193.603.061
4.2.2	Dana Alokasi Umum	197.965.352.600
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	33.591.600.000
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	26.382.564.514
4.3.1	Pendapatan Hibah	0
4.3.2	Dana Darurat	0
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.382.564.514
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
	Jumlah Pendapatan	**436.278.780.175**
5	**Belanja**	
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	171.119.335.594
5.1.1	Belanja Pegawai	157.963.020.344
5.1.2	Belanja Bunga	0
5.1.3	Belanja Subsidi	0
5.1.4	Belanja Hibah	5.693.315.250
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.963.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	0
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
5.2	**Belanja Langsung**	288.959.444.581
5.2.1	Belanja Pegawai	21.617.631.953
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	97.136.207.403
5.2.3	Belanja Modal	170.205.605.225
	Jumlah Belanja	**460.078.780.175**
	Surplus/ (defisit)	**(23.800.000.000)**
6	Pembiayaan	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	23.800.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	23.800.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**23.800.000.000**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	0
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.4		0

Jumlah Pengeluaran pembiayaan 0

Pembiayaan Neto 23.800.000.000

Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor : 2
Tanggal : 25 Januari 2012

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	551.512.624.952,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	26.877.233.067,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	8.072.300.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.849.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	700.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.255.933.067,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	483.288.017.405,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	162.759.972.405,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	299.641.875.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.886.170.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	41.347.374.480,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.769.449.000,00
1.3.7	Dana Tunjangan Profesi Guru	19.577.925.480,00
2	**BELANJA**	569.012.624.952,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	274.963.492.884,00
2.1.1	Belanja Pegawai	257.500.730.853,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.566.966.850,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.210.960.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.684.835.181,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	294.049.132.068,00
2.2.1	Belanja Pegawai	14.737.380.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.594.681.051,00
2.2.3	Belanja Modal	145.717.070.517,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.500.000.000,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	20.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000.000,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	17.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PRABUMULIH, 25 Januari 2012
WALIKOTA

Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM